

Pertanyaan 7 anggota parlemen Belanda dan Jawaban Menlu Belanda

Tanggal 12 Januari 2021

Subjek Menjawab pertanyaan dari anggota 1. Voordewind (ChristenUnie), 2. Karabulut (SP), 3. Ploumen (PvdA), 4. Van Raan (PvdD), 5. Van Ojik (GroenLinks), 6. Van Helvert (CDA) dan 7. Van der Staaij (SGP) tentang situasi hak asasi manusia di WestPapua Dengan ini saya tawarkan, juga atas nama Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama pembangunan, jawaban atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh anggota Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Ojik (GroenLinks), Van Helvert (CDA) dan Van der Staaij (SGP) tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat.

Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan pada 24 November 2020 dengan referensi 2020Z22582.

Menteri Luar Negeri, Balasan Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan untuk pertanyaan dari anggota Voordewind (ChristenUnie), Karabulut (SP), Ploumen (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Ojik (GroenLinks), Van Helvert (CDA) dan Van der Staaij (SGP) tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat

Pertanyaan 1

Bisakah Anda memberikan gambaran tentang pengiriman senjata Belanda ke Indonesia lima tahun terakhir, dipecah berdasarkan produk dan kuantitas? Apakah Anda berbagi percaya bahwa tidak ada senjata, amunisi atau perlengkapan yang dikirim ke Indonesia yang bisa digunakan dengan satu atau lain cara dalam penindasan rakyat Papua Barat? Bagaimana Anda memastikan yakin ini tidak terjadi?

Jawaban

Ada rincian penjualan barang sejak tahun 2015

Semua aplikasi lisensi untuk ekspor barang militer diuji kasus per kasus berdasarkan sifat barang dan penggunaan akhir terhadap delapan kriteria Posisi Bersama Uni Eropa tentang Ekspor Senjata. Ini juga berlaku untuk permohonan ekspor ke Indonesia. Situasi di Papua dan Papua Barat (selanjutnya: Papua) diperhitungkan, termasuk yang terkait dengan kriteria 2 (penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional) dan kriteria 3 (konflik internal). Pengendalian ekspor bertujuan untuk mencegah barang / teknologi digunakan dengan cara yang tidak diinginkan. Jika ada risiko peralatan tersebut akan digunakan secara melawan hukum terhadap penduduknya sendiri, misalnya di Papua, tidak akan ada izin yang dikeluarkan. Penilaian risiko yang sangat hati-hati dilakukan sebelum ekspor. Belanda tidak dapat terus memantau barang / teknologi setelah diekspor dan berganti kepemilikan. Kami tidak memiliki yurisdiksi di negara untuk melakukannya, atau kapasitas untuk melacak barang setelah diekspor. Meskipun ada kekhawatiran tentang hak asasi manusia atau konflik internal di negara penerima, ada kemungkinan aplikasi izin dikirim ke negara itu dinilai secara positif. Dalam kasus tersebut, penilaian menunjukkan bahwa barang tersebut tidak, atau tidak berdampak negatif, mempengaruhi barang tersebut situasi hak asasi manusia dan / atau konflik internal.

Pertanyaan 2

Pendanaan eksternal dari Program Perpolisian Komunitas sekarang dihapus? Apakah Anda yakin bahwa program ini sekarang terus berjalan dengan sukses dilakukan oleh polisi dan komunitas itu sendiri? Menurut Anda apa yang ditunjukkan ini? Ada Petugas polisi yang dilatih oleh Belanda terlibat dalam kekerasan terhadap penduduk setempat? Bagaimana sikap polisi dalam konflik antara penduduk Papua dan pemerintah Indonesia?

Menjawab

Kontribusi Belanda untuk Program Perpolisian Komunitas berlangsung hingga Juli 2019. Masyarakat di Papua dan Maluku kini melanjutkan program tersebut sumber daya sendiri. Indikasi penting untuk ini adalah, misalnya, di pada akhirnya dukungan Belanda sudah 78% dari pembiayaan local pemerintah, polisi dan pendanaan lokal lainnya. Juga melalui itu proyek mengembangkan dan meluncurkan pendekatan perpolisian komunitas di 80 lainnya komunitas berhasil direplikasi (selain 22 komunitas di mana forum didirikan sebagai bagian dari proyek yang didukung Belanda dengan IOM).

Petugas polmas yang didukung oleh program tersebut adalah Petugas polisi komunitas tidak bersenjata hadir di masyarakat. Agen ini memainkan peran dalam menengahi konflik lokal antara warga sipil dan masalah keamanan lokal, bukan penegakan hukum. Polisi Komunitas Forum (CPF) telah berperan dalam menangani masalah keamanan lokal, kekerasan dalam rumah tangga, dan konflik tanah.

Pertanyaan 3

Apakah Anda sudah mendapat informasi tentang Petisi Rakyat Papua (PRP) yang menentang pembaruan Otonomi Khusus, yang didukung oleh 90 sosial organisasi? Jika tidak, Anda siap untuk memeriksa dengan orang Indonesia pihak berwajib? Apakah Anda memiliki keberatan dan kekhawatiran yang sama dari organisasi-organisasi ini terhadap organisasi ini Otonomi Khusus?

Menjawab

Saya akrab dengan petisi di mana berbagai organisasi berbicara menentang perpanjangan otonomi khusus di Papua. Pemerintah Belanda bersikeras mendesak pihak berwenang Indonesia untuk menjaga dialog konstruktif dengan penduduk di Papua, juga tentang masa depan status otonomi khusus untuk kedua provinsi.

Pertanyaan 4

Apakah Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Papua Barat sudah dikunjungi? Apakah Anda bersedia bergabung dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia tanyakan pada PBB apakah telah diundang untuk mengunjungi daerah tersebut? Apakah kamu siap mendesak pemerintah Indonesia dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia? Jika tidak, kenapa tidak?

Menjawab

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia belum memiliki Papua dikunjungi, sebagian karena kunjungan akibat krisis korona untuk sementara hampir mustahil telah menjadi. Dia memang memiliki undangan tetap untuk berkunjung Indonesia. Perwakilan Tetap Belanda di PBB memiliki tentang hal ini pada tanggal 3 Desember lalu dengan kabinet Komisaris Tinggi untuk Berbicara tentang hak asasi manusia. Belanda telah menyatakan akan berkunjung dianggap penting oleh Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk Papua. Belanda juga akan bergabung kembali dengan Indonesia pada kesempatan berikutnya pihak berwenang mengindikasikan bahwa penting untuk melakukan kunjungan secepat mungkin bisa jadi.

Pertanyaan 5

Apakah jurnalis sekarang memiliki akses gratis ke Papua Barat? Jika tidak, apakah Anda siap tanyakan pihak berwenang Indonesia mengapa akses seperti itu tidak tersedia dan di sana Selain itu, untuk menegaskan bahwa jurnalis harus diberi akses ke area tersebut?

Pertanyaan 6

Apakah Anda siap untuk membunuh pendeta Kristen Yeremia Zanambani akan diangkat secara bilateral dan juga di Dewan Hak Asasi Manusia PBB? Jika tidak, mengapa tidak?

Pertanyaan 7

Dapatkah Anda melihat situasi HAM masyarakat Papua saat ini menggambarkan? Bisakah Anda memberikan gambaran tentang social organisasi dan media yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di WestPapua?

Jawab pertanyaan 5, 6 dan 7

Situasi hak asasi manusia di Papua memiliki berbagai kekhawatiran, termasuk insiden kekerasan terhadap warga sipil, tetapi juga kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat dan posisi pembela hak asasi manusia dan (lokal) wartawan. Kementerian dan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta punya kontak rutin dengan organisasi masyarakat sipil yang memantau situasi ini.

Meskipun demikian, saya tidak memiliki gambaran lengkap tentang masalah social organisasi dan media mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat. Situasi di Papua, termasuk hak sasi manusia, adalah bagian permanen dari dialog bilateral antara Belanda dan Indonesia. Jadi saya punya situasi hak asasi manusia di dua provinsi di koordinasi Indonesia Menteri Politik, Hukum dan Keamanan diangkat selama kunjungan kenegaraan Maret lalu. Pada kesempatan kali ini saya juga punya arti penting gratis akses untuk jurnalis. Masih sulit bagi jurnalis untuk bepergian ke Papua. Kekhawatiran tentang situasi hak asasi manusia di Papua secara teratur kepada pihak berwenang Indonesia ditransfer. Pembunuhan Yeremia Zanambani baru-baru ini dibicarakan konsultasi resmi senior dengan Indonesia November lalu. Belanda akan digelar selama Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2021 untuk menarik perhatiannya kesimpulan yang bagus dari penyelidikan para pelaku pembunuhan ini.

Pertanyaan 8

Bisakah Anda memberikan gambaran tentang organisasi sosial dan media kerusakan yang didokumentasikan terhadap lingkungan, habitat dan iklim yang disebabkan oleh perusahaan pertambangan internasional, industri minyak dan gas, dan pembukaan hutan dilakukan di Papua Barat? Dan Anda dapat menunjukkan apakah dan bagaimana Perusahaan Belanda terlibat dalam aktivitas ini? Jika tidak, Anda sudah siap untuk meminta klarifikasi tentang hal ini dari pihak berwenang Indonesia dan untuk menyerahkannya berbicara tentang kerusakan ini?

Pertanyaan 9

Menurut Anda, bagaimana Belanda bisa berkontribusi pada hak asasi manusia Indonesia, lebih menghormati lingkungan dan lingkungan hidup penduduk Papua Barat?

Jawab pertanyaan 8 dan 9

Belanda sedang memantau situasi di bidang hak asasi manusia dan bisnis dan lingkungan di Papua, dan lebih luas lagi di Indonesia. Namun, saya tidak memilikinya gambaran total dari semua kerusakan yang didokumentasikan terhadap lingkungan, lingkungan hidup dan iklim di Papua. Kedutaan memiliki, sebagaimana didefinisikan dalam pedoman IRBC untuk Jaringan misi Belanda, lima tugas inti di bidang IRBC: membangun keahlian, menciptakan kesadaran, mendukung komunitas bisnis, memeriksa atau memberikan dukungan kepada perusahaan adalah tepat, dan menempatkan ICSR dalam agenda dengan otoritas lokal. Itu Oleh karena itu, Kedutaan Besar di Jakarta secara teratur berbicara dengan perusahaan Belanda tentang pentingnya ICSR. Setahu saya tidak ada Belanda perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang Anda sebutkan. Dari Belanda Pemerintah mengharapkan perusahaan menerapkan due care sejalan dengan itu Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional dan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Itu adalah tanggung jawab perusahaan itu sendiri untuk mencegah dan melawan dampak negatif pada manusia dan lingkungan untuk meraih.

Tanggung jawab sosial perusahaan (dan dampak lingkungan sama pentingnya bagian dari itu) adalah bagian dari dialog yang dilakukan Belanda dengan Pihak berwenang Indonesia berbicara tentang hak asasi manusia dan keberlanjutan. Begitu juga Menteri Kaag pada awal Desember bersama rekannya dari Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan membahas Omnibus Act baru, yang menimbulkan kekhawatiran antara LSM dan investor asing. Selama percakapan dia memiliki kekhawatiran di bidang lingkungan dan hukum perburuhan dan didorong untuk satu dialog dengan masyarakat sipil. Selain itu, Belanda mendukung dalam Indonesia memperkuat masyarakat sipil, termasuk di bidang bisnis dan hak asasi manusia, keberlanjutan dan lingkungan.

Diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia oleh: TIM SUARA PAPUA